

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Peran dan fungsi *stakeholder* pemerintah, swasta dan masyarakat dalam program PBPA di Kementerian Agama menunjukkan bahwa:

1. Peran-fungsi *stakeholder* pada indikator variabel kolaborasi konsep Ansell dan Gash (2007) berjalan sesuai dengan kondisi awal; kelembagaan yang terstruktur; kepemimpinan yang berimbang; proses pelaksanaan berbasis tatap muka; dan menerima hasil antara/pertengahan atas kesepakatan bersama.
2. Model *collaborative governance* dalam program PBPA yang merujuk pada prinsip dinamika kolaborasi Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012), berjalan berdasarkan pada prinsip keterlibatan yang dilakukan melalui diskusi/FGD, berbagi motivasi antar individu yang sama (siklus berulang), dan mengembangkan kemampuan dalam menjalankan tugas.
3. Terdapat indikasi bahwa peran pemerintah (Kementerian Agama) cenderung lebih mendominasi dalam program ini. Pihak swasta (penerbit) hanya menjadi objek yang buku terbitannya di nilai dalam program PBPA. Adapun peran masyarakat relatif tidak aktif karena keterlibatannya hanya mengatasnamakan individu.

B. Saran

Tata kelola sistem perbukuan melalui program PBPA yang menjadi tanggungjawab pihak pemerintah, swasta dan masyarakat belum berjalan seimbang dan proporsional berbasis kolaboratif yang berkeadilan, setara, dan profesional. Oleh karena itu saran-saran yang dapat dilakukan antara lain:

1. Kementerian Agama perlu mengembangkan konsep *collaborative governance* dalam program PBPA berbasis pada indikator variabel kolaborasi yang mempertimbangkan kondisi harmonis, rancangan kelembagaan yang terstruktur,

kepemimpinan kooperatif, proses kolaboratif tatap muka, menjunjung komitmen bersama, dan menyepakati hasil antara/pertengahan.

2. Kementerian Agama perlu mengembangkan model *collaborative governance* makro dan mikro dalam pelaksanaan program PBPA berbasis pada prinsip dinamika kolaborasi yang berazas keadilan, kesetaraan, dan keseimbangan pada peran-fungsi *stakeholder* baik kelembagaan maupun individu yang merepresentasikan pemerintah, swasta, dan masyarakat.
3. Pemerintah perlu memfasilitasi pembentukan organisasi pengawasan terhadap buku-buku pendidikan agama yang merepresentasikan kelompok swasta dan masyarakat dengan melibatkan perguruan tinggi agama, asosiasi profesi, majelis-majelis agama, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan tokoh masyarakat.

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR PUSTAKA

- Ad'han, S., Haryanto, J. T., Perwira, R., Nuruddin, S., Syuhudi, I., Maknun, M. L., Subair, M., Zakiah, Z., Ismail, I., Ilyas, H. F., Arafah, S., Anwar, S., & Malika, F. (2021). *Metode penelitian kebijakan bidang agama* (1st ed.). Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar.
- Alam, M. (2020). A collaborative action in the implementation of moderate Islamic education to counter radicalism. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 11(7). www.ijicc.net
- Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory Advance Access No.18 Published by Oxford University Press*, 543–571.
- Aziz, A. A., Nurfarida, R., Budiyaniti, N., & Zakiah, Q. Y. (2020). Model Analisis Kebijakan Pendidikan. *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah*, 4(2), 192. <https://doi.org/10.32332/tapis.v4i2.2575>.
- Bianchi, C., Nasi, G., & Rivenbark, W. C. (2021). Implementing collaborative governance: models, experiences, and challenges. *Public Management Review*, 23(11), 1581–1589. <https://doi.org/10.1080/14719037.2021.1878777>.
- Bråten, O. M. H., & Skeie, G. (2020). ‘Deep learning’ in studies of religion and worldviews in Norwegian schools? the implications of the national curriculum renewal in 2020. *Religions*, 11(11), 1–16. <https://doi.org/10.3390/rel11110579>.
- Charalabidis, Y., & Loukis, E. (2012). Participative public policy making through multiple social media platforms utilization. *International Journal of Electronic Government Research (IJEGR)*, 8(3), 78–97.
- Diana, D., & Hakim, L. (2021). Strategi kolaborasi antara perguruan tinggi, industri dan pemerintah: tinjauan konseptual dalam upaya meningkatkan inovasi pendidikan dan kreatifitas pembelajaran di perguruan tinggi. *Prosiding Konferensi Nasional Ekonomi Manajemen dan Akuntansi (KNEMA)*, 1(1).

- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar analisis kebijakan publik (Terjemahan)* (2nd ed.). Gadjah Mada University Press.
- Dwiyanto, A. (2018). *Ilmu administrasi publik di Indonesia: mencari identitas?* Gadjah Mada University Press.
- Dwiyanto, A. (2021). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. UGM PRESS.
- Dyah, S. W., & Prasojo, E. (2020). Tata kelola kolaboratif dalam upaya penanggulangan pasca gempa di wilayah Jawa Bagian Barat. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 8(2), 313–332.
- Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). *Collaborative governance regimes*. Georgetown University Press.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29.
- Farianita, R., Nugraheni, S. A., & Kartini, A. (2020). Kolaborasi pada program kursus calon pengantin di Kabupaten Grobogan. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 9(1), 9–19. <https://core.ac.uk/download/pdf/295415984.pdf>.
- Gachie, W. (2020). Higher education institutions, private sector and government collaboration for innovation within the framework of the Triple Helix Model. *African Journal of Science, Technology, Innovation and Development*, 12(2), 203–215.
- Hasanah, H. (2017). Teknik-teknik observasi (sebuah alternatif metode pengumpulan data kualitatif ilmu-ilmu sosial). *At-Taqaddum*, 8(1), 21–46.
- Hudson, B., Hunter, D., & Peckham, S. (2019). Policy failure and the policy-implementation gap: can policy support programs help? *Policy Design and Practice*, 2(1), 1–14.
- Juzwik, M. M., LeBlanc, R. J., Davila, D., Rackley, E. D., & Sarroub, L. K. (2022). Spiritual and religious meaning making in language and literacy studies: global perspectives on teaching, learning, curriculum and policy. In *English*

- Teaching* (Vol. 21, Issue 3, pp. 225–237). Emerald Group Holdings Ltd.
<https://doi.org/10.1108/ETPC-03-2022-0051>.
- Kasiram, M. (2010). *Metodologi penelitian: Kualitatif–kuantitatif* (Moh. Idris, Ed.). Uin-Maliki Press.
- Keban, Y. T. (2008). Enam dimensi strategis administrasi publik: konsep, teori, dan isu. In *Cetakan Pertama. Yogyakarta: Penerbit Gaya Media: Vol. II. Gaya Media*.
- Kementerian Agama, P. L. K. B. L. dan D. K. A. (2009). *Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Tadqiq Lektur Keagamaan*.
- Koppenjan, J. F. M., & Klijn, E.-Hans. (2004). *Managing uncertainties in networks: a network approach to problem solving and decision making*. Routledge.
- Maulana, A. E., Rivai, A. K., & Sarwani, S. (2020). Analisis kualitas sistem layanan penilaian buku pendidikan agama (SiLPBPA) menggunakan metode System Usability Scale (SUS) dan pengembangannya menggunakan Scrum berbasis Web. *Jurnal Teknik Informatika*, 13(2), 103–122.
- Milward, H. B., & Provan, K. G. (2006). *A manager's guide to choosing and using collaborative networks (networks and partnerships series)*. IBM Center for the Business of Government.
- Moleong, L. J. (2018). Metodologi penelitian kualitatif. In *Remaja Rosdakarya* (38th ed.). Remaja Rosdakarya.
- Muharram, A. T., & Maulana, A. E. (2019). Perancangan sistem PBPA. *Applied Information Systems and Management (AISM)*, 2(2), 91–96.
- Mukhlis, M., & Makhya, S. (2020). Model Kolaborasi Kebijakan Deradikalisasi Agama Berbasis Pondok Pesantren. *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi)*, 6(1), 63–79. <https://doi.org/10.18784/smart.v6i1.905>
- Noor, M., Suaedi, F., & Mardiyanta, A. (2022). *Collaborative Governanace: suatu tinjauan teoritis dan praktik*.

https://repository.unair.ac.id/126355/1/4.%20Collaborative%20Governance_ebook.pdf.

- Nthontho, M. A., & Addai-Mununkum, R. (2021). Towards religious literacy in South African schools: is the life orientation curriculum potent enough? *Journal of Beliefs and Values*, 42(4), 436–449. <https://doi.org/10.1080/13617672.2020.1859790>.
- Nugraha, M. S., & Fauzan, M. (2020). Penanggulangan potensi radikalisme melalui penilaian buku pendidikan agama pada sekolah dan madrasah. *Tatar Pasundan: Jurnal Diklat Keagamaan*, 14(1), 1–18.
- Pasolong, H. (2019). *Teori administrasi publik* (IX). Alfabeta Bandung.
- Perwira, R. (2021). Collaborative governance dalam penilaian buku pendidikan agama di Kementerian Agama. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, 5(1), 159–165.
- Prasojo, E. (2021). *Konsep dan studi kebijakan publik: urgensi kebijakan publik dan merumuskan masalah kebijakan yang baik di era volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity*.
- Rhodes, R. A. W. (2007). Understanding governance: Ten years on. *Organization Studies*, 28(8), 1243–1264. <https://doi.org/10.1177/0170840607076586>.
- Ridder, H.-G. (2014). *Book Review: Qualitative data analysis. A methods sourcebook* (Vol. 28, Issue 4). Sage publications Sage UK: London, England.
- Rifàti, E. F. (2016). *Strategi mengelola program organisasi dengan dukungan seluruh stakeholder terkait dengan pendekatan Net Mapping pada penyusunan proyek perubahan dalam diklat PIM IV pola baru*.
- Rosenbloom, D. H., & Kravchuck, R. S. (2005). *Public administration: understanding management, politics, and law on the public sector*. McGraw-Hill International. <https://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=20151176>.
- Rosidi, A., & Fajriani, R. A. (2013). *Reinventing local goverment, demokrasi dan Reformasi Pelayanan Publik* (1st ed.). Andi.

Smith, J. A., & Osborn, M. (2007). *Interpretative phenomenological analysis: theory, method and research. In qualitative Psychology, A practical gguide to research methods.*

Sugiyono, S. (2015). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D* (21st ed.). Alfabeta.

Tilano, A., & Suwitri, S. (2019). Collaborative governance dalam upaya keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 8(3), 34–51.

Unstad, L., & Fjørtoft, H. (2021). Disciplinary literacy in religious education: the role and relevance of reading. *British Journal of Religious Education*, 43(4), 434–442. <https://doi.org/10.1080/01416200.2020.1754164>.

Wawo, A. K. A. S. (2020). *Analisis collaborative governance dalam penyelenggaraan festival Pinisi tahun 2019 di Kabupaten Bulukumba.* Universitas Hasanuddin.

Wijaya, C., & Rifa'i, M. (2016). *Dasar-dasar manajemen: mengoptimalkan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien.* Perdana.

Regulasi dan Peraturan-Peraturan

- Undang-Undang Nomor 3 tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan
- Peraturan Pemerintah' Nomor 75 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 25 tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024
- Renstra Pusat Kurikulum dan Perbukuan tahun 2020-2024 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 9 tahun 2018 tentang Buku Pendidikan Agama
- SK Kepala Balitbang Diklat Kementerian Agama No. 51 tahun 2018 tentang Penulisan, Penilaian, dan Penerbitan Buku Pendidikan Agama

- SK Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Nomor 62 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Buku Pendidikan Agama pada Sekolah dan Madrasah.

Informan Wawancara

- Salman Hanean, Direktur Pendidikan Agama Katolik, Ditjen Bimas Agama Katolik
- Sugeng, Kasubbag Tata Usaha Puslitbang LKKMO
- Bahari, Koordinator Program PBPA
- Ridwan Bustamam, Supervisor Program PBPA
- Jerry Hendrajaya, Ketua Program PBPA 2023
- Fakhriati, Penilai Buku Pendidikan Agama/Peneliti BRIN
- Nurohmah, Verifikator Program PBPA 2023
- Adison Pasaribu, Supervisor Program PBPA/Peneliti BRIN
- Mulyawan, Supervisor Program PBPA
- Anonymous, Penerbit Erlangga
- Anonymous, penerbit unsur pemerintah
- Anonymous, Guru Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar di Jakarta
- Antonius Sinaga, penilai buku pendidikan agama Katolik
- Anonymous, Supervisor Program PBPA/Dosen Bahasa Arab PTKIN
- Anonymous, Penilai Buku/Analisis Kebijakan Agama Khonghucu